

KORUPSI DALAM WACANA PERS LOKAL
(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013 Pada Surat Kabar Malang Post)

Alda Laseta Ayatullah
NIM: 0911213037
E-mail: Ald.ayatullah@gmail.com

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAKSI

Penelitian ini mencoba memberikan pandangan bagaimana pers lokal yakni Malang Post merepresentasikan isu-isu korupsi dalam bentuk berita, terutama terhadap kasus-kasus korupsi di tingkat nasional seperti kasus Hambalang dalam kurun waktu tahun 2013. Analisis wacana kritis kemudian digunakan sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan wacana surat kabar Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013.

Tipe analisis wacana kritis yang digunakan adalah perspektif Norman Fairclough yang dilakukan dengan tiga level analisis yaitu *pertama*, pada level mikro berupa analisis teks berita kasus Hambalang tahun 2013. *Kedua*, level meso berupa analisis praktik wacana yang terdiri dari produksi teks oleh Malang Post dan konsumsi teks oleh masyarakat sebagai pembaca. *Ketiga*, level makro berupa analisis praktik sosiokultural terdiri dari situasional, institusional, dan sosial yang terjadi ketika teks berita kasus Hambalang diproduksi. Selain itu, konsep bahasa dan kekuasaan perspektif Norman Fairclough juga digunakan sebagai kajian teoritis.

Hasil analisis wacana kritis menunjukkan terdapat dua wacana yang merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post, yaitu wacana hukum dan korupsi yang menggambarkan kasus Hambalang sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang menuntut adanya penyelesaian hukum dan wacana politik dan kekuasaan yang menggambarkan konspirasi dan konflik kepentingan diantara elit politik yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada level mikro, terlihat wacana dalam teks memiliki proyeksi ideologi yang mengunggulkan posisi pelaku korupsi terutama terhadap Anas Urbaningrum dan memarjinalkan peran KPK sebagai lembaga penegak hukum. Pada level meso, mengidentifikasi bahwa wacana Malang Post sebagai pers lokal dalam mengkonstruksi kasus Hambalang merupakan hasil penafsiran kembali dari teks JPNN (Jawa Pos National Network) yang dikondisikan dengan selera masyarakat lokal. Pada level makro, situasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia mempengaruhi perkembangan kasus Hambalang dalam wacana Malang Post. Malang Post sebagai pers lokal merupakan “pers partisan” yang melegitimasikan kepentingan pemilik media yang berorientasi pada kapitalisme dan politik.

Kata kunci: Representasi, ideologi, hukum, politik, dan kepentingan.

ABSTRACT

This research tries to provide a local perspective, Malang Post in representing text news of corruption issues, especially about corruption issues in national level like Hambalang case during 2013. Critical discourse analysis then used as research approach that purpose is to know, analyze, and interpret Malang Post discourse in representing Hambalang case in 2013.

Types of analysis critical discourse that is used is Norman Fairclough perspective was used with three level analysis that is *first*, in micro level which analyze news text of Hambalang in 2013. *Second*, meso level that analyze practice of discourse which contains of text production of Malang Post and text consumption by the society as the readers. *Third*, macro level which analyze practice of sociocultural which contains of situational, institutional, and social aspect that influenced the production of Hambalang case's news text. In addition, concept of language and power in Norman Fairclough perspective also as theoretical study.

The result of critical discourse shows that there are two discourse that represent Hambalang case in Malang Post, they are corruption and law discourse which saw Hambalang case as corruption criminal act which demands law enforcement. Then second, political and power discourse which describe conspiracy and conflict of interest among political elites who involve in the case. In micro level, showing that the discourse in the text has ideology projection which put corruption actor, Anas Urbaningum, in a higher position compare to KPK role even as law enforcement institution. In meso level, it identifies Malang Post discourse as local perspective constructing Hambalang case in fact as the result of re-interpretation of JPNN (Jawa Pos National Network) which situated with local readers's interest. In macro level, social, economy, and political aspects which was happening in Indonesia had influenced the report of Hambalang case in Malang Post discourse. Malang Post as local perspective is "pers partisan" which legitimated the owner of media interest which oriented to capitalism and politics

Keyword: Representation, ideology, politic, law, and interest.

PERS DAN ISU KORUPSI

Korupsi dari yang berskala kecil sampai melibatkan jaringan elit di tingkat nasional merupakan peristiwa yang selalu mewarnai setiap liputan pers di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari monitoring yang dilakukan oleh Indonesia Indicator melalui media sosial dan media cetak yang memiliki versi koran elektronik terhadap aktivitas pemberitaan media-media massa di Indonesia selama tahun 2013. Hasilnya selama tahun 2013 dalam setiap bulan tidak pernah sepi dari pemberitaan tentang korupsi, dari 1.872.234 pemberitaan sebanyak 152.346 merupakan berita kasus korupsi, artinya pemberitaan korupsi menempati porsi sebesar 8,14 % dari seluruh pemberitaan (Hidayat, 2014).

Liputan tentang korupsi selama tahun 2013 merupakan sebuah frekuensi pemberitaan yang cukup tinggi dengan rata-rata 12.656 pemberitaan perbulan, jika dibandingkan dengan pemberitaan fenomena-fenomena lainnya, seperti pemberitaan tentang kemiskinan yang hanya mencapai rata-rata 2.724 berita setiap bulannya (Hidayat, 2014).

Liputan tentang praktik korupsi oleh pers tidak hanya dilakukan pers atau media massa yang berskala nasional melainkan juga melibatkan pers-pers lokal yang terbit di daerah terutama oleh surat kabar lokal. Dari sekian banyak surat kabar lokal yang tersebar diseluruh Indonesia, Malang Post menjadi salah satu pers lokal yang konsisten memberitakan kasus korupsi, tidak hanya isu-isu korupsi dalam konteks lokal dimana surat kabar tersebut diterbitkan melainkan juga pada isu-isu korupsi nasional dan menjadi konsumsi publik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kasus Hambalang menjadi salah satu kasus korupsi ditingkat nasional yang rutin diberitakan oleh Malang Post, terutama pada tahun 2013. Kasus Hambalang sendiri merupakan kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kasus ini melibatkan banyak pihak, seperti pejabat publik dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan sejumlah elit partai politik terutama dari Partai Demokrat maupun dari kalangan

pengusaha pelaksana proyek Hambalang (Setia, 2012).

Sebagai pers lokal, Malang Post mencoba merekam dan memaknai peristiwa demi peristiwa dari perkembangan kasus Hambalang dan berperan dalam menentukan bagaimana kasus tersebut harus dipahami oleh masyarakat. Malang Post dalam memberitakan kasus Hambalang sebagai kasus korupsi dalam konteks nasional menciptakan wacana korupsi dalam perspektif Malang Post sebagai pers lokal. Wacana tersebut dihadapkan pada konteks sosial dan dinamika yang sedang terjadi dalam internal dan eksternal media maupun dalam lingkup kelokalan.

Wacana Malang Post terhadap kasus Hambalang dapat dilihat dari teks berita yang disajikan, karena teks merupakan konstruksi realitas yang dikemas sesuai dengan kebijakan Malang Post sebagai pihak yang memproduksi. Teks tersebut mengandung unsur representasi terhadap fenomena maupun terhadap aktor-aktor tertentu yang digambarkan dalam teks. Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dapat dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan ide, kepentingan atau melegitimasi ideologi tertentu dari kelas tertentu. (Littlejohn, 2002, hlm: 217).

Berpijak pada posisi Malang Post sebagai pers lokal dalam merepresentasikan permasalahan korupsi dalam bentuk berita, terutama terhadap kasus-kasus korupsi di tingkat nasional seperti kasus Hambalang dalam kurun waktu tahun 2013 dengan berbagai kepentingan ideologis, politik, dan ekonomi hingga idealisme yang dianut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah “bagaimana wacana surat kabar Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013?”. Atas dasar pertanyaan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan wacana surat kabar Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013.

Sebagai subyek analisis, penelitian ini secara detail akan menganalisis teks berita kasus Hambalang tahun 2013 yang diterbitkan oleh surat kabar Malang Post dan dipilih sesuai dengan kajian penelitian. Adapun teks berita tersebut sebagai berikut:

Tabel 1: Daftar Klasifikasi Berita

No.	Judul Berita	Edisi
1.	Andi Mallarangeng Diperiksa KPK	Jumat, 11 Januari 2013
2.	Hambalang Jadi Proyek Demokrat 1	Selasa, 12 Februari 2013
3.	Anas Tersangka, Terancam 20 Tahun Penjara	Jumat, 22 Februari 2013
4.	KPK Tak Ragu Usut Ibas Jika Terlibat Hambalang	Jumat, 15 Maret 2013
5.	Orang Besar Minta Anas Jadi Tersangka	Jumat, 5 Juli 2013
6.	Anas : Dulu Dituduh Terima Rp 100 M, Kini Sisa Rp 2 M	Jumat, 08 November 2013

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2013

Dengan teks sebagai kajian, penelitian ini merupakan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang melihat bahasa dalam teks untuk dianalisis. Bahasa dianalisis bukan hanya menggambarkan aspek kebahasaan tetapi juga menghubungkan dengan konteks, sehingga dalam meneliti bahasa dalam teks berita kasus Hambalang tahun 2013 akan dikaitkan dengan aspek-aspek yang terdapat di luar teks yang melibatkan Malang Post sebagai pihak yang memproduksi teks sekaligus masyarakat sebagai pembaca maupun pada konteks sosial yang mempengaruhi produksi teks tersebut.

Tipe analisis wacana kritis yang digunakan adalah dalam perspektif Norman Fairclough yang menitikberatkan pada bahasa sebagai praktik kekuasaan. Melihat bahasa dalam perspektif ini membawa konsekuensi tertentu. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk dari tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu analisis wacana kritis ini dipusatkan pada bagaimana bahasa itu dibentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Eriyanto, 2012, hlm. 285).

Norman Fairclough kemudian membagi analisis wacana kritis dalam tiga level, yaitu: analisis teks, praktik wacana (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) (Fairclough, 1992, hlm. 63). Pada level analisis tekstual, penelitian ini akan menganalisis teks berita kasus Hambalang tahun 2013 melalui analisis bahasa secara kritis dengan melihat tata bahasa, kosa kata dan struktur teks untuk mengkaji representasi, relasi, dan identitas yang ditampilkan dalam teks berita.

Tabel 2: Unsur Analisis Tekstual

Unsur	Yang Dilihat
Representasi	bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan dalam teks
Relasi	bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks
Identitas	bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks

Sumber : Eriyanto, 2012, Hlm. 289.

Analisis pada level praktik wacana akan melakukan penelusuran terhadap produksi dan konsumsi teks berita kasus Hambalang. Data analisis praktik wacana ini diperoleh melalui wawancara kepada tim redaksi Malang Post terutama kepada Redaktur dan Sekretaris Redaksi sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses produksi teks. Begitu pula wawancara kepada pembaca Malang Post sebagai penafsir teks atau pihak yang mengkonsumsi teks. Pada analisis praktik sosiokultural dilakukan dengan menelusuri aspek situasional yang melihat bagaimana teks berita kasus Hambalang tahun 2013 dibentuk dengan memperlihatkan situasi tertentu, kemudian aspek institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi media dalam produksi wacana. Institusi organisasi media ini bisa berasal dari internal maupun eksternal Malang Post seperti modal atau kepemilikan dan institusi politik tertentu, serta juga aspek sosial yang berkembang dimasyarakat yang mempengaruhi penerbitan teks berita kasus Hambalang pada tahun 2013. Analisis praktik sosiokultural ini ditunjang dengan hasil kajian pustaka melalui referensi, jurnal, hasil riset dan survey, sumber dari internet maupun catatan dan arsip yang dipublikasikan oleh Malang Post melalui website resmi www.malang-post.com.

Berita kasus Hambalang Pada Surat Kabar Malang Post

1) Genre berita kasus Hambalang

Berita kasus Hambalang pada surat kabar Malang Post dibedakan menjadi dua versi, yaitu: *pertama*, berita utama atau berita seputar peristiwa yang menjadi kronologi pengungkapan kasus Hambalang seperti berita penyidikan, pencekalan, atau pula berita penahanan pelaku korupsi. Berita

seperti ini misalnya berita dengan judul “Anas Tersangka, Terancam 20 Tahun Penjara”. *Kedua*, berita seputar peristiwa yang melingkupi peristiwa utama atau disebut sebagai berita kaki, biasanya berita ini menyangkut pelaku-pelaku korupsi secara personal atau isu politik yang mengiringi kasus Hambalang. Berita dengan judul “Orang Besar Minta Anas Jadi Tersangka”, merupakan berita kaki karena berita tersebut tidak secara langsung menggambarkan proses pengusutan kasus Hambalang, berita tersebut lebih kepada personal Anas Urbaningrum yang berhubungan dengan isu politik.

Berita kasus hambalang pada surat kabar Malang Post dimuat pada Rubrik Nasional. Rubrik tersebut secara khusus memuat berita-berita nasional atau liputan peristiwa yang terjadi dalam lingkup nasional, hal ini dikarena kasus Hambalang yang diberitakan merupakan peristiwa yang beredar secara nasional, bukan peristiwa lokal yang terjadi di wilayah Malang Raya sebagai tempat terbitan Malang Post. Berita kasus Hambalang dalam perspektif Malang Post dikemas dengan konteks lokal Malang melalui penggunaan tata bahasa yang sifatnya lebih ringan, tidak terlalu akademis, bahkan “*ceplas-ceplos*” dalam menyampaikan fakta dan kerap kali juga menggunakan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa.

Berita kasus Hambalang versi Malang Post sebagai berita korupsi berbeda dengan berita korupsi pada surat kabar yang peredarannya secara nasional seperti Jawa Pos, Surya, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, dan lain sebagainya. Media-media tersebut dalam menulis berita korupsi mengacu pada peliputan investigatif (*investigative reporting*) dengan mencari, menemukan, dan menyampaikan fakta-fakta adanya pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat untuk mengekspose praktik-praktik korupsi atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik beserta aktivitasnya (Septiawan, 2004, hlm. 135).

Berita kasus Hambalang versi Malang Post dikategorikan sebagai berita informasi dan kritik yang lebih condong pada model penulisan interpretatif. Liputan seperti ini mengandung pemikiran, penafsiran, pandangan, dan tidak jarang juga merupakan pendapat wartawan dalam teks berita. Wartawan di sini mengulas suatu

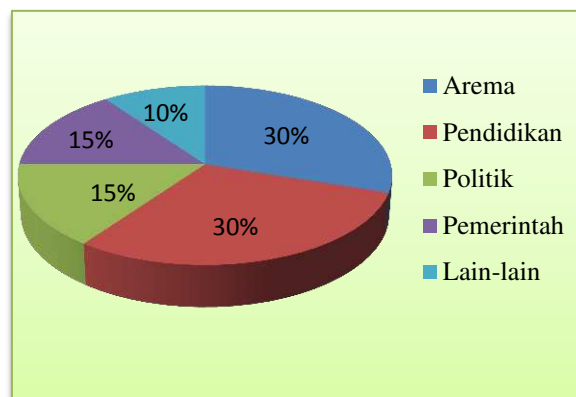
berita yang baru terjadi ataupun yang sudah lama terjadi dengan memberikan interpretasi, spekulasi, dan pendapat. Malang Post tidak mengarahkan model penulisan teks berita kasus Hambalang tahun 2013 kepada liputan interpretatif secara keseluruhan.

Liputan interpretatif dapat dilakukan dengan melompati nilai-nilai berita tradisional seperti aspek kedekatan peristiwa yang diberitakan (*proximity*), aktualitas (*timesliness*), hingga konflik yang merupakan dasar untuk menetapkan berita-berita apa saja yang layak dimuat (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2007, hlm. 242). Kasus Hambalang yang diberitakan Malang Post merupakan peristiwa yang tidak bisa dikatakan baru karena sudah terjadi pada tahun 2011, kasus tersebut juga tidak berhubungan dengan wilayah dan masyarakat Malang secara langsung sebagai tempat terbitan Malang Post.

2) Persebaran berita kasus Hambalang kepada pembaca Malang Post

Malang Post tidak melakukan peliputan kasus Hambalang dilapangan, melainkan langsung mengambil bahan berita dari JPNN (Jawa Pos National Network) atau dari media online Pikiran Rakyat karena sama-sama tergabung dalam kelompok media Jawa Pos Grup sehingga memungkinkan adanya kerjasama dalam hal keredaksionalan.

Posisi Malang Post sebagai pers lokal yang terbit didaerah tidak memungkinkan untuk meliput peristiwa diluar jangkauan media tersebut karena kasus Hambalang secara geografis maupun secara emosional tidak berhubungan langsung dengan wilayah Malang sebagai terbitan Malang Post. Motif utama Malang Post memberitakan kasus Hambalang didasari pada perluasan segmentasi pembaca. Berita kasus Hambalang digunakan Malang Post untuk menggaet pembaca yang tertarik dengan isu-isu korupsi yang biasanya juga berhubungan dengan isu-isu politik dan pemerintahan. Pembaca tersebut masuk termasuk kelompok masyarakat kelas menengah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan berkecukupan secara penghasilan. Adapun segmentasi pembaca yang dibidik Malang Post adalah sebagai berikut:



Sumber: Profil Malang Post, 2013.

Gambar 1: Segmentasi pembaca Malang Post

Berita kasus Hambalang pada surat kabar Malang Post disebarkan ke tiga wilayah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu sebagai tempat terbitan utama. Ketiga wilayah tersebut diyakini mampu menarik pembaca Malang post dalam jumlah besar terutama dari kelompok masyarakat seperti suporter sepakbola, dan kalangan pendidikan. Kelompok masyarakat dari kalangan pendidikan diyakini Malang Post lebih antusias terhadap isu-isu korupsi selain isu-isu yang berkembang ditingkat lokal Malang sehingga rubrikasi dan berita Malang Post salah satunya lebih mengakomodir pembaca tersebut.

3) Orientasi Malang Post sebagai pers lokal Malang

Malang Post tergabung dalam JPNN (Jawa Pos National Network) dibawah Jawa Pos Grup bersama dengan 207 koran, 65 percetakan, 42 stasiun TV lokal lainnya dan dimiliki oleh Dahlan Iskan (Anonim, 2013). Secara tampilan Malang Post mandiri dan berbeda dengan surat kabar lokal lainnya yang juga di miliki oleh Jawa Pos Grup yang sebagian besar berbentuk Radar sebagai kontributor daerah sehingga versi cetak dari Radar akan satu eksemplar dengan surat kabar Jawa Pos yang ditempatkan untuk membedakan segmentasi berita lokal dengan berita nasional.

Malang Post dengan gagasan bermedia maupun secara ideologis identik dengan Dahlan Iskan, sehingga merepresentasikan pemikiran dan semangat Dahlan Iskan dalam setiap terbitan. Melalui semboyan “*Kerja..Kerja..Kerja.*” yang digagas oleh Dahlan Iskan menjadi acuan Malang Post untuk menjalankan media, baik sebagai lembaga pers maupun sebagai perusahaan profit. Begitu pula dengan *quotes-quotes* atau kutipan yang diberi label “*Ngopi Bareng Dahlan*” yang

berisi gagasan, kritik sosial dan motivasi dalam memaknai fenomena-fenomena yang ada di masyarakat yang meliputi banyak bidang seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.

Orientasi Dahlan Iskan secara ideologi maupun secara politik turut direpresentasikan dalam terbitan Malang Post termasuk dalam teks berita kasus Hambalang. Latar belakang politik Dahlan Iskan sebagai kader Partai Demokrat dan sebagai bakal calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat tahun 2014 menjadikan Malang Post sebagai pers lokal yang mendukung pamor Dahlan Iskan dalam ranah politik. Melalui semboyan "*Demi Indonesia*", Malang Post secara tidak langsung mengakomodir kepentingan Dahlan Iskan dalam dunia politik dan menjadi media yang berfungsi untuk menarik simpati masyarakat. Malang Post kemudian menjadi media kemenangan Dahlan Iskan yang ditempatkan di wilayah Malang Raya dan dinamai dengan "*Posko Sriwijaya*" karena berlokasi di jalan Sriwijaya sebagai mana lokasi Malang Post berkantor, atau "*Padepokan Demi Indonesia Malang Raya*". Posko tersebut memfasilitasi masyarakat Malang dan sekitarnya yang ingin bergabung guna mendukung Dahlan Iskan dalam konvensi Partai Demokrat dan sebagai calon presiden alternatif pada Pilihan Presiden tahun 2014.

Wacana Malang Post Dalam Representasi Berita Kasus Hambalang

a. Konstruksi Wacana Kasus Hambalang

Malang Post sebagai pihak yang memproduksi teks berita kasus Hambalang tahun 2013 menggunakan bahasa sebagai alat perjuangan kekuasaan untuk membangun wacana tertentu dan memarginalkan wacana-wacana lain dengan mengukuhkan ideologi yang dibawa melalui pemilihan kosakata, metafora, maupun kombinasi anak kalimat bagi kepentingan posisi hegemonik dari teks tersebut. Hasil analisis enam teks berita kasus Hambalang yang menjadi kajian penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua wacana besar yang dibangun oleh Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang sebagai kasus korupsi nasional yaitu wacana hukum dan korupsi dengan wacana politik dan kekuasaan yang saling berkontradiksi.

Wacana hukum dan korupsi maupun wacana politik dan kekuasaan yang direpresentasikan dalam teks merupakan wacana yang memiliki kepentingan untuk mengukuhkan pandangan-pandangan tentang definisi korupsi dalam perspektif Malang Post sebagai pers lokal yang terbit di daerah. Sebagai sebuah wacana, representasi wacana hukum dan korupsi memiliki karakter dominatif dalam upaya penegakkan hukum. Wacana ini membangun pengetahuan terhadap proses pengusutan kasus Hambalang masuk dalam ranah-ranah hukum sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan menyalahi aturan hukum sehingga menuntut adanya proses penyelesaian hukum yang berpusat pada KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi.

Sebaliknya, representasi wacana politik dan kekuasaan dalam teks memiliki karakter dominatif yang melegitimasi kasus Hambalang sebagai kasus korupsi yang penuh dengan praktik politik dan kepentingan didalamnya. Wacana tersebut merupakan wacana hegemonik yang memiliki kepentingan untuk memarginalkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat anti korupsi sehingga kontra terhadap upaya penegakkan hukum dan berusaha untuk membawa pemahaman masyarakat dalam isu-isu politik yang mengandung nilai kontroversi dengan elit-elit politik terutama yang berasal dari Partai Demokrat seperti Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum hingga Edi Baskoro Yudhoyono sebagai partisipan yang dominan diberitakan dan bukan berdasar pada sudut pandang KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Secara keseluruhan, teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post menampilkan identitas politik yang diekspresikan oleh elit-elit politik ditengah bergulirnya proses penegakkan hukum dalam pengusutan kasus tersebut. Beberapa elit politik yang terlibat kasus Hambalang terutama Anas Urbaningrum tidak diposisikan sebagai tersangka korupsi, sebaliknya Anas justru diposisikan sebagai pihak yang berusaha melakukan perlawanan atas ketidakadilan hukum. Kasus Hambalang yang menimpa Anas kemudian dilabeli dengan sebutan "*imajiner*", "*politisasi*", atau pula "*sarat politik*" sebagai fenomena yang ditandakan dalam teks dan kemudian teks tersebut memproduksi realitas sosial tertentu yang mengeliminasi kesan-kesan Anas Urbaningrum

sebagai pelaku korupsi dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik melalui proses ideologisasi.

Untuk merealisasikan proyeksi ideologi, representasi wacana yang dibangun oleh Malang Post memiliki kepentingan kekuasaan untuk mengeksklusi setiap dominasi penegak hukum (KPK) sebagai penentu pengusutan kasus Hambalang atau mengeksklusi wacana-wacana alternatif yang mencoba untuk menawarkan isu-isu penegakkan hukum lainnya maupun pada wacana yang membangun *counter* hegemoni terhadap gagasan-gagasan praktik korupsi dengan menempatkan KPK sebagai representasi penegakkan hukum di Indonesia yang harus ditolak dalam teks. Wacana tersebut justru menginklusi pengetahuan yang melegitimasi kasus Hambalang masuk kedalam ranah politik yang dihubung-hubungkan dengan Partai Demokrat.

Kecenderungan Malang Post dengan wacana politik dan kekuasaan dalam menggambarkan kasus Hambalang menunjukkan identitas Malang Post yang terkesan tidak serius dalam memberitakan kasus Hambalang yang seharusnya menjadi alat kontrol sosial di masyarakat dengan mengarahkan isu-isu korupsi dalam ranah penegakkan hukum. Pada konteks inilah menunjukkan motif-motif kekuasaan Malang Post sebagai pihak yang memproduksi teks yang berpandangan bias dan berpihak pada kepentingan dengan mengunggulkan posisi pelaku korupsi dalam kasus Hambalang yang memiliki latar belakang elit politik terutama terhadap Anas Urbaningrum dalam teks, yang tidak ditempatkan selayaknya sebagai pelaku korupsi yang harus mendapat proses hukum sesuai dengan peraturan hukum pidana.

b. Strategi Kostruksi Wacana

Analisis praktik wacana ini memusatkan perhatian pada proses produksi dan konsumsi teks untuk memberikan wawasan dalam membedah wacana yang menjadi fondasi Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013. Produksi teks berhubungan dengan wacana apa yang membentuk teks, pada dasarnya ini merupakan proses interpretasi terhadap teks, proses ini menghubungkan antara teks dengan praktik sosial.

1) Rutinitas Produksi Teks Berita Kasus Hambalang

Secara keseluruhan rutinitas produksi teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post melalui beberapa rangkaian pola dan tahapan, rutinitas tersebut membentuk praktik sosial sosial yang berada pada proses interaksi sosial diantara aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

Sebagai wujud dari praktik sosial, teks mengandung unsur bahasa yang dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu. Rutinitas produksi teks berita kasus Hambalang tahun 2013 memperlihatkan tidak secara keseluruhan individu dalam struktur organisasi Malang Post dilibatkan langsung dalam proses produksi berita. Wartawan lapangan Malang Post tidak secara langsung meliput berita kasus Hambalang sehingga ada pemotongan alur produksi berita. Begitu pula dengan peran redaktur yang bertanggungjawab terhadap proses editing teks terbatas, dalam hal ini pandangan redaktur Malang Post terhadap kasus Hambalang tidak banyak dituliskan dalam berita sehingga berita kasus Hambalang identik dengan berita dari JPNN hanya saja berbeda pembahasan termasuk pada konstruksi wacana dan kepentingan yang memihak pada kelompok tertentu. Adapun peran redaktur dalam penulisan teks berita kasus Hambalang meliputi:

a) Menentukan Bahan Berita

Redaktur mendapat rekomendasi melalui rapat redaksi untuk mengambil beberapa bahan berita dari JPNN atau media online Pikiran Rakyat sebagai acuan maupun untuk diolah kembali dan diterbitkan versinya Malang Post. Hal tersebut dilakukan karena wartawan Malang Post tidak meliput langsung peristiwa kasus Hambalang dilapangan.

b) Pemilihan Tema Berita

Malang Post kemudian menggunakan nilai berita yang diadaptasi dari Jawa Pos sebagai parameter dalam menentukan layak tidaknya sebuah peristiwa itu penting menjadi berita termasuk pada kasus Hambalang yang akan diberitakan. Nilai berita yang dianut oleh Malang Post terdiri dari tiga belas unsur yaitu aktual, kedekatan, penting, luar biasa, tokoh, eksklusif, ketegangan, konflik, *human interest* (mampu menyentuh emosi pembaca), seks, *progresif*, *trend*, dan humor (Wajis, 2012, hlm. 43).

c) Proses Penyuntingan Teks

Pada dasarnya penyuntingan berita kasus Hambalang yang dilakukan oleh Malang Post menganut kaidah-kaidah jurnalistik yang selama ini juga digunakan oleh media-media di seluruh Indonesia, namun kaidah jurnalistik yang dianut oleh Malang Post lebih banyak mengadopsi dari Jawa Pos. Aspek yang dominan mengalami proses editing dari segi bahasa sehingga berita kasus Hambalang antara Malang Post dengan JPNN sebagai sumber berita utama nampak berbeda walaupun terdapat kesamaan substansial.

Tata Bahasa yang digunakan Malang Post dalam teks berita kasus Hambalang tahun 2013 bertujuan untuk lebih mendekatkan antara peristiwa yang diberitakan dengan pembaca lokal. Pada dasarnya bahasa sebagai simbol didalamnya mengandung makna dan nilai-nilai kultural yang berlaku, dan dijunjung tinggi oleh pemakainya. Dengan demikian penggunaan bahasa lokal untuk menanamkan nilai ideologis akan mudah diterima oleh masyarakat sebagai pembaca.

Praktik sosial yang cenderung didominasi oleh JPNN memang tidak menjadi masalah serius bagi Malang Post, setidaknya melalui proses ini Malang Post tidak memiliki kuasa penuh terhadap strategi konstruksi wacana yang dibangun dalam teks berita kasus Hambalang tersebut. Konstruksi Malang Post akan selalu mengikuti konstruksi yang dibangun oleh JPNN lengkap dengan bias dan keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu yang digambarkan dalam teks berita.

Walaupun Malang Post mengikuti JPNN dalam memberitakan kasus Hambalang termasuk dalam hal strategi konstruksi wacana, definisi korupsi yang direpresentasikan Malang Post dalam teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada dasarnya tidak dibangun dari pemikiran yang apa adanya melainkan dibentuk oleh wacana yang sedang berkembang pada konteks situasi dan institusi yang sedang terjadi ditubuh Malang Post maupun JPNN sebagai media yang saling berelasi. Produksi teks berita kasus Hambalang tahun 2013 ini berhubungan dengan wacana apa yang membentuk teks tersebut, hal ini selalu berkaitan dengan ranah pengetahuan apa yang membentuk konstruksi wacana dalam teks dengan sistem pengetahuan apa yang dimasukkan dan yang coba dikeluarkan ke dalam teks tersebut.

Konstruksi yang dibangun Malang Post dalam teks berita kasus Hambalang tahun 2013

merupakan hasil dari kontestasi kekuasaan yang dimenangkan oleh Malang Post sebagai pihak yang memproduksi teks terhadap pembaca sebagai pihak yang mengkonsumsi teks. Kekuasaan ini dilakukan melalui kontrol dan pembatasan terhadap isi teks berita, relasi yang memperlihatkan pembentukan posisi subyek, dan subyek yang melibatkan identitas atau status sosial (Fairclough, 2003, hlm. 53). Sehingga dengan adanya kontrol dan pembatasan akan memberikan mempengaruhi pembaca terhadap sistem pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas sosial. Kontrol dan pembatasan ini merupakan sebuah mekanisme kuasa bahasa dalam memberikan wacana kepada masyarakat melalui teks sehingga menciptakan sebuah dominasi wacana atas masyarakat berdasarkan konstruksi wacana media. Adapun kontrol dan pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Isi (*Contents*)

Kasus Hambalang dalam representasi Malang Post membatasi pada dua wacana besar yaitu wacana hukum dan korupsi dengan wacana politik dan kekuasaan. Pada dasarnya setiap teks yang muncul baik dalam masing-masing frase dan kata hadir dalam ruang yang sarat kekuasaan dimana proses marjinalisasi, pembedaan, dan pendefinisian pihak lainnya merupakan bagian penting dari pembentukan identitas dari setiap wacana yang dibentuk.

Wacana hukum dan korupsi mempersempit konteks pemberitaan kasus Hambalang sebagai tindak pidana korupsi yang menuntut adanya penyelesaian hukum. Teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post kemudian lebih banyak menggambarkan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah KPK terhadap pelaku kasus Hambalang.

Begitu pula dengan wacana politik dan kekuasaan yang membatasi kasus Hambalang identik dengan elit politik atau partai politik secara lembaga sebagai pihak yang dominan digambarkan dalam teks. Elit politik dalam artian praktisi politik, yang mencakup mereka yang terpilih dalam pemilihan umum, yang diangkat dalam jabatan tinggi, dan juga para pemimpin partai politik (Rahardjo, 2010, hlm. 59-60). Elit politik tersebut seperti Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum maupun Edi Baskoro Yudhoyono

yang digambarkan identik dengan konflik kepentingan kekuasaan dalam kasus Hambalang.

Adanya kontrol dan pembatasan terhadap isi yang dilakukan Malang Post membawa dampak struktural terhadap wacana dalam konstruksi pengetahuan dan keyakinan yang mengarahkan kasus Hambalang dalam kedua wacana tersebut yang saling kontradiktif. Kasus Hambalang dipahami sebagai kasus korupsi yang harus mendapat proses hukum ada pula yang memahami kasus Hambalang identik dengan masalah politik dan kekuasaan semata.

b) Relasi (*Relations*)

Titik perhatian pada batasan relasi ini adalah bagaimana pola hubungan diantara antara aktor tadi ditampilkan dalam teks. Pola relasi yang terbangun dalam teks berita kasus Hambalang menempatkan pihak KPK sebagai lembaga penegak hukum yang mengusut kasus Hambalang dengan para pelaku korupsi seperti Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, atau Edi Baskoro Yudhoyono.

Unsur yang melegitimasi pembatasan terhadap relasi adalah sikap keberpihakan Malang Post yang ditunjukkan dalam teks yang dapat dilihat ketika pendapat dalam berita didominasi oleh pendapat pihak tertentu dan menjadi wacana yang dominan sedangkan pihak yang lainnya pendapat/suaranya tidak ditampilkan sehingga terkesan dimarjinalkan. Keberpihakan tersebut dapat dilihat melalui penulisan judul, kosakata, metafora dan bagaimana struktur dan komposisi pemberitaan dikonstruksi. Dalam hal ini relasi yang terjadi menunjukkan ketidaksetaraan, Malang Post lebih menempatkan diri dengan para pelaku korupsi terutama kepada sosok Anas Urbaningrum, karena teks-teks yang dikonstruksi lebih memenangkan sosok Anas Urbaningrum sebagai pelaku korupsi, penggambaran sosok Anas kerap kali ditempatkan dominan dan mendapat pembelaan dalam teks walaupun sebagai tersangka korupsi yang seharusnya mendapat penghakiman.

Relasi ini menciptakan hubungan sosial diantara Anas Urbaningrum sebagai pelaku kasus Hambalang dengan pembaca. Hubungan sosial yang terjadi adalah adanya kedekatan antara pihak Anas Urbaningrum dengan masyarakat melalui perantara Malang Post. Malang Post dalam hal ini merupakan media yang digunakan oleh pihak Anas Urbaningrum dalam menyuarakan

pembelaan-pembelaan terkait kasus Hambalang yang menjeratnya melalui konstruksi wacana yang direpresentasikan dalam teks berita kasus Hambalang yang diarahkan untuk lebih mendukung sosok Anas Urbaningrum. dalam hal ini ada proyeksi ideologis melalui opini publik yang dibuat.

c) Subyek (*Subjects*)

Pembatasan terhadap subyek dapat terlihat dari penempatan tokoh-tokoh yang diberitakan dalam kasus Hambalang yakni Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Ibas dan tentunya juga Partai Demokrat sehingga subjek yang dikonstruksi dalam teks berita kasus Hambalang adalah kalangan elit politik yang sedang berkuasa.

Berita kasus Hambalang yang melibatkan elit politik ditujukan kepada pembaca lokal yang ada diwilayah Malang Raya, berita ini tidak ditujukan kepada pembaca secara universal yang ruang lingkungannya lebih dari kawasan Malang Raya seperti regional Jawa Timur maupun. Sehingga subyek yang tersirat dalam teks berita kasus Hambalang yakni pihak yang memiliki memproduksi teks (Malang Post) dan masyarakat yang mengkonsumsinya terutama masyarakat yang ada diwilayah Malang Raya dan daerah sekitarnya.

Pembatasan terhadap subyek menimbulkan dampak pada identitas sosial, terutama terhadap identitas Malang Post sebagai pers lokal yang ada di daerah. Dengan memberitakan kasus Hambalang Malang Post mencerminkan surat kabar lokal yang peduli terhadap permasalahan korupsi ditingkat nasional terutama yang berhubungan dengan masalah politik dan kekuasaan, karena pemberitaan kasus Hambalang pada surat kabar Malang Post lebih menitikberatkan pada elit politik yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal tersebut tentunya akan membuat masyarakat lokal tertarik pada surat kabar Malang yang tidak hanya membutuhkan berita lokal disisi lain Malang Post terkesan tidak serius dalam memberitakan kasus Hambalang yang seharusnya memprioritaskan penegakkan hukum dari pada isu-isu politik sehingga ada kecenderungan Malang Post dicap sebagai pers lokal yang bermotif ekonomi semata dengan membuat berita layaknya drama yang melibatkan elit politik sehingga memiliki nilai jual.

2) Interpretasi Pembaca Malang Post

Analisis pada level konsumsi teks ini berusaha mengembangkan proses interpretasi pembaca terhadap teks untuk melihat bagaimana pembaca mampu menafsirkan wacana-wacana yang direpresentasikan dalam teks, dan bagaimana implikasinya bagi efektivitas politis dan ideologis dari teks. Berita kasus Hambalang disebarluaskan kepada golongan atau kelompok masyarakat yang “melek politik” biasanya dalam hierarki masyarakat Malang adalah kalangan pendidikan dan pemerintahan atau politik. Oleh karena itu, data penunjang analisis ini diperoleh dari informan yang berlatarbelakang akademis atau kelompok masyarakat kelas menengah. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti adalah Benny Rinaldi Aliando Lubis merupakan mahasiswa ilmu politik dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kemudian Anas Amrullah Hidayat yang juga memiliki latarbelakang akademis dan saat ini bekerja dalam bidang penyiaran media.

Wacana Malang Post terhadap kasus Hambalang juga dapat dilihat dari interpretasi pembaca. Sebagai pembaca, Benny melihat pemberitaan kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post lebih banyak menitikberatkan pada tindakan terutama yang berhubungan dengan aktor-aktor kasus Hambalang. Menurutnya aspek yang dominan direpresentasikan adalah upaya KPK dalam mengusut kasus Hambalang sehingga pemberitaan Malang Post selalu menyertakan KPK dengan para pelaku korupsi terutama dengan latarbelakang sebagai elit politik seperti Anas Urbaningrum sedangkan pelaku-pelaku lainnya tidak terlalu banyak diberitakan. Seperti penjelasan Benny berikut ini:

“Menurut saya yang paling dominan diberitakan dalam kasus Hambalang oleh Malang Post itu Anas Urbaningrum, terutama terkait tindakan KPK dalam mengusut kasus Hambalang, Anas juga ditempatkan dalam pemberitaan lain ketika berhubungan dengan tersangka lainnya.”

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan Anas Amrullah, menurutnya apa yang coba digambarkan oleh Malang Post tentang kasus Hambalang merupakan hal yang wajar dalam setiap pemberitaan media massa. Menurutnya pemberitaan kasus Hambalang pada konteks

media lokal tidak terlalu memprovokasi walaupun juga terdapat beberapa *angle* yang mengarahkan keberpihakkan media kepada pihak tertentu.

“Keberpihakkan dalam berita itu sebenarnya ada tapi tidak terlalu nampak. Kalau di Malang Post semua kejadian yang menyangkut kasus Hambalang semuanya diberitakan, mulai dari unsur korupsi, politik, dan penokohan. Tetapi tetap juga tetap ada aspek yang dominan diberitakan.”

Anas menyadari bahwa berita kasus Hambalang yang di terbitkan Malang Post banyak menitikberatkan terhadap upaya-upaya yang diarahkan kepada proses penanganan hukum terhadap para pelaku korupsi, namun dalam beberapa pemberitaan jika dicermati yang dikenai tindakan hanya orang-orang tertentu, tidak semua pihak yang terindikasi dan terlibat kasus Hambalang diberitakan oleh Malang Post. Anas juga sependapat dengan Benny jika kasus Hambalang dalam pemberitaan Malang Post lebih menitikberatkan pada sosok Anas Urbaningrum.

Baik Benny dan Anas, keduanya sepakat jika sisi politis dari kasus Hambalang terlalu dominan diangkat sehingga kesan kasus Hambalang sebagai kasus korupsi tergantikan dengan isu-isu politis. Bahkan dalam berita, ada upaya Malang Post untuk menjustifikasi pihak-pihak tertentu dan mengunggulkan pihak yang lain sehingga memperlihatkan kepentingan politik dari masing-masing pihak yang terindikasi dalam kasus Hambalang.

Berdasarkan informasi dari Benny dan Anas Amrullah sebagai pembaca, terlihat jelas bagaimana pembaca menafsirkan teks berita kasus Hambalang secara berbeda. Latar belakang pembaca dengan konteks sosio historis berpengaruh besar terhadap proses penafsiran teks, dimana teks yang ditafsirkan akan dihubungkan dengan konteks sosio historis yang dimiliki pembaca, sehingga wacana yang dimaknai oleh pembaca juga akan berbeda-beda.

Benny sebagai pembaca teks cenderung melakukan perlawanan terhadap wacana yang direpresentasikan dalam teks berita kasus Hambalang tahun 2013, terutama ketika teks tersebut membawa kepentingan dan ideologis sehingga wacana-wacana yang direpresentasikan dalam teks menjadi bias dan berpihak pada pihak tertentu, sedangkan Anas tidak terlalu melakukan perlawanan terhadap teks, Anas Amrullah lebih

banyak mengiyakan isi dari berita yang ditampilkan tetapi perlawanan yang dilakukannya juga menyoroti masalah kepentingan dan ideologis yang dibawa oleh teks.

c. Sosiokultural Berita Kasus Hambalang

Pada konteks ini, teks berita kasus Hambalang tahun 2013 tidaklah muncul begitu saja tetapi dibentuk oleh wacana yang juga tidak lepas dari hubungan-hubungan sosial, relasi sosial maupun institusi sosial. Pada dasarnya kehadiran suatu wacana tidaklah muncul dalam situasi yang damai dan harmonis melainkan wacana dibentuk dalam suatu formasi pertentangan politik dengan wacana-wacana lainnya (Macdonell, 2005, hlm.45-46).

Posisi Malang Post sebagai pers lokal didaerah dalam memberitakan kasus Hambalang tahun 2013 dipengaruhi berbagai macam peristiwa dan aturan-aturan yang terjadi dalam lingkup internal maupun eksternal Malang Post sebagai lembaga pers dan sebagai perusahaan profit. Melalui analisis praktik sosiokultural ini, melihat keterhubungan dari suatu teks dengan formasi politik global dan lokal yang mempengaruhi produksi teks tersebut, maupun relasi antara institusi media sebagai tempat dimana teks tersebut ditampilkan dengan relasi sosial dan politik yang terjadi sedang terjadi di masyarakat. Maka dalam konteks ini menelusuri tiga hal yang menjadi pokok analisa yaitu aspek situasional, institusional, dan sosial, karena ketiga aspek tersebut mengkonstruksikan realitas sosial dan menyumbangkan peran dalam proses produksi wacana Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013.

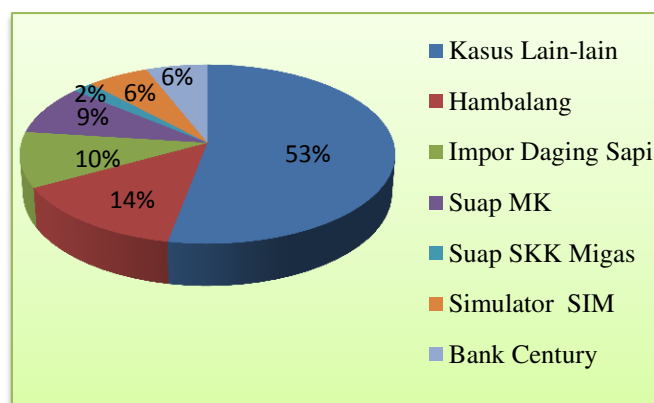
Ketiga aspek, yaitu situasional, institusional, dan sosial dapat diuraikan dengan tahun 2013 dimana teks berita kasus Hambalang diproduksi merupakan momentum beberapa skandal korupsi besar di tanah air terbongkar ke publik yang disertai dengan dominan ekspose media disertai dengan kondisi politik yang tidak menentu menjelang Pemilu tahun 2014. Begitu juga dengan kondisi internal dan eksternal Malang Post tidak lepas dengan relasi media. Disisi lain kebebasan pers mendorong konglomerasi media sehingga mengakibatkan pers dimiliki oleh pengusaha yang berorientasi politik, hal-hal seperti inilah yang kemudian menciptakan wacana korupsi yang terepresentasikan dalam teks berita kasus

Hambalang tahun 2013 versi Malang Post yang berbeda dengan media-media lainnya.

1) Skandal Korupsi dan Masa Transisi Politik Tahun 2013

Teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post secara situasional diproduksi ketika selama tahun 2013 perhatian publik tertuju pada dua isu utama yang sedang terjadi di Indonesia yaitu korupsi dan politik. Maraknya kasus korupsi selama tahun 2013 dapat dilihat dari pemberitaan media massa yang menempatkan kasus korupsi sebagai fenomena yang paling banyak diekspose oleh media. Monitoring yang dilakukan oleh Indonesia Indicator menempatkan beberapa kasus korupsi besar seperti kasus Suap Impor Daging Sapi, kasus Suap MK, dan beberapa kasus korupsi lainnya sebagai kasus korupsi yang mewarnai pemberitaan media massa selama tahun 2013 dan mengiringi kasus Hambalang (Hidayat, 2014).

Berikut ini intensitas pemberitaan kasus korupsi seperti yang dirilis oleh Indonesia Indicator lebih lanjut:



Sumber : Data IndonesiaIndicator, 2013.

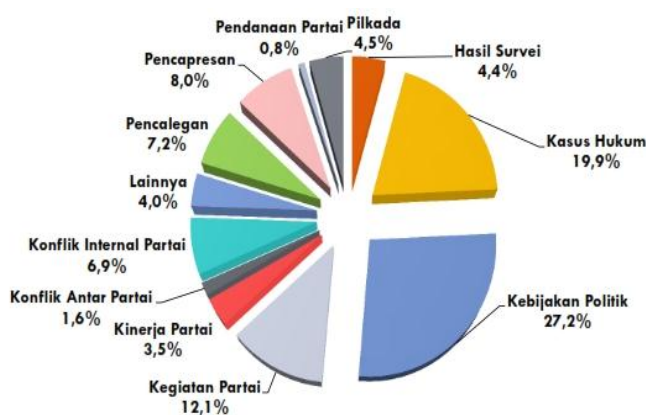
Gambar 2 : Pemberitaan media tentang korupsi selama tahun 2013

Grafik di atas menunjukkan dari seluruh pemberitaan mengenai korupsi, terlihat bahwa kasus Hambalang sebagai kasus korupsi yang paling mendominasi pemberitaan sepanjang tahun 2013 yakni sebesar 14%, diluar gabungan dari pemberitaan kasus-kasus korupsi lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa secara situasi tahun 2013 merupakan tahun dimana kasus Hambalang mencapai popularitasnya karena paling banyak disorot oleh publik, hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan Malang Post sebagai pers lokal didaerah untuk terus memberitakan kasus tersebut terutama dalam menciptakan opini-opini publik

dalam tataran masyarakat lokal, dan untuk mengimbangi opini publik yang dibuat oleh media-media lainnya.

Tahun 2013 juga disebut sebagai masa transisi politik, dimana banyak agenda-agenda politik yang dilakukan oleh partai politik guna mempersiapkan pemilu pada tahun 2014. Hal tersebut diutarakan berdasarkan hasil media monitoring selama 1 Februari - 24 Desember 2013 yang dilakukan oleh Poltracking Institute yang menempatkan berita-berita politik lebih kepada sosialisasi partai politik selain pada permasalahan hukum (Poltracking, 2014).

Berikut ini data yang dirilis oleh Poltracking Institute selengkapnya:



Sumber: Data Poltracking Institute, 2014.

Gambar 6 : Monitoring berita politik selama tahun 2013

Berdasarkan riset di atas perhatian publik pada berita partai politik banyak tersita kepada tema-tema seperti kebijakan politik (27,2%), kasus hukum (19,9%), kegiatan partai (12,1%) dan pencapresan (8%). Hasil temuan ini menandakan, menjelang Pemilu 2014, secara agregatif di tahun 2013 pemberitaan terkait pelaksanaan dan optimalisasi fungsi partai juga sudah mulai marak diberitakan yaitu terkait respon atas kebijakan politik dan kegiatan partai kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan partai politik mulai gencar memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan visi dan misi yang dijalankan atau sekedar menghubungkan dengan realitas politik tertentu.

Masa transisi politik juga berpengaruh terhadap kemunculan berita kasus Hambalang pada surat kabar Malang Post, dimana perkembangan wacana politik dilapangan akan menjadi pertimbangan Malang Post dalam menerbitkan berita kasus Hambalang. Sehingga

berita kasus Hambalang juga mengedepankan isu-isu politik yang menyertai kasus tersebut yang berhubungan dengan Partai Demokrat karena pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Hambalang tidak lain adalah kader-kader Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum maupun Andi Mallarangeng sebagai obyek yang dominan diberitakan.

Disisi lain berita korupsi yang seharusnya mengedepankan pada upaya penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berubah menjadi media yang mendukung elit politik. Obyektivitas Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang lebih berhubungan dengan Anas Urbaningrum maupun Andi Mallarangeng sebagai tersangka korupsi, posisi mereka tidak ditempatkan sebagai pihak yang disalahkan justru sebaliknya status tersangka yang mereka sandang coba diekskusi oleh Malang Post. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra dalam rangka meningkatkan elektabilitas personal maupun Partai Demokrat secara umum menjelang Pemilu Legislatif maupun Pilpres 2014. Konstruksi tersebut menghasilkan opini-opini tertentu yang diterima oleh masyarakat sebagai pembaca, supaya mereka tetap percaya dan tetap memilih dalam pemilu nanti.

2) Relasi Malang Post dengan JPNN

Malang Post secara institusi memiliki relasi dengan JPNN yang membawa pengaruh secara managerial dan keredaksionalan. Relasi tersebut berdampak positif bagi perkembangan Malang Post sebagai pers lokal yang lebih profesional secara organisasi maupun redaksional atau tampilan. Disisi lain segala kebijakan Malang Post secara tidak langsung diatur oleh JPNN, hal ini kemudian menunjukkan bahwa Malang Post tidak memiliki independensi dan rawan intervensi pemilik modal termasuk dalam melakukan proses penerbitan berita. Dalam konteks pemberitaan kasus Hambalang kemudian didominasi JPNN baik dalam konstruksi berita maupun ide penerbitan karena Malang Post menggunakan berita dari JPNN yang disesuaikan dengan konteks lokal Malang.

Relasi Malang Post dengan JPNN juga tidak lepas dari Dahlan Iskan sebagai pemilik Malang Post dan JPNN melalui kebijakan, pemikiran dan latar belakang yang dimilikinya secara tidak langsung turut merepresentasikan dalam teks berita kasus Hambalang yang diterbitkan oleh Malang

Post dengan muatan ideologi tertentu. Teks media pada dasarnya bukan hanya sebagai cermin realitas tapi juga membuat versi yang sesuai dengan posisi sosial, kepentingan dan sasaran yang memproduksi teks. Maka tidak mengherankan jika peran media justru menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media melalui produksi kesadaran dan laporan palsu tentang realitas objektif yang sudah bias karena dibentuk oleh kelompok kepentingan baik secara politik maupun ekonomis.

Secara ideologi Malang Post banyak merepresentasikan pandangan kapitalisme-liberalisme, hal ini dapat dilihat dari motif utama Malang Post dalam memberitakan kasus Hambalang yang berdasar pada pertimbangan pasar. Malang Post akhirnya mengenyampingkan aspek-aspek yang seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan kasus-kasus korupsi seperti pada upaya penegakkan hukum sebaliknya aspek-aspek yang menjadikan berita korupsi menarik untuk diberitakan ditempatkan secara dominan yang tujuannya layak untuk dijual kepada pembaca. ideologi tersebut juga mengarahkan pada ideologi dari Dahlan Iskan.

Kapitalisme liberal menjadi ideologi yang dianut Malang Post dengan mengarahkan sebagai media yang berorientasi pada motif-motif ekonomi dengan mengusung kebebasan berfikir sebagai lembaga pers. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dalam meliput berita dan bebas menempatkan pandangan dalam berita termasuk pandangan terhadap aktor-aktor yang diberitakan. Ideologi Malang Post ini bersifat implisit yang tidak dirumuskan langsung melainkan melalui ide-ide pemberitaan yang dibuat.

Malang Post kemudian menjadi pers partisan yang mendukung Dahlan Iskan dalam dunia politik yang berorientasi pada partai Demokrat. Berita-berita yang berhubungan dengan Partai Demokrat sebagai orientasi politik Dahlan Iskan menghadapi skala penyensoran besar-besaran ketika sang pemilik mengikuti konvensi dan bergabung dengan Partai Demokrat terutama pada bulan-bulan Oktober-Desember pada tahun 2013. Berita-berita kasus Hambalang yang sempat bernada sinis kepada Partai Demokrat teralihkan dengan berita yang lebih mengarah pada personal tokoh atau dengan berita-berita kasus-kasus korupsi lainnya yang tidak berhubungan dengan Partai Demokrat atau pula

Malang Post membuat opini publik semacam bentuk klarifikasi terhadap Partai Demokrat yang sebelumnya cenderung menjustifikasi partai tersebut. Bahkan menjelang diumumkannya pemenang konvensi lambat laun intensitas pemberitaan kasus Hambalang sempat menghilang. Tebang pilih pemberitaan Malang Post terhadap kasus Hambalang disebabkan adanya ideologi Malang Post yang dipengaruhi oleh wacana politik Dahlan Iskan yang mengacu pada Partai Demokrat dan kontradiktif terhadap proses pengusutan kasus Hambalang yang sebagian besar melibatkan kader-kader Partai Demokrat.

Malang post juga sebagai sarana komunikasi politik Dahlan Iskan dengan tujuan sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik guna mendukung Dahlan Iskan sebagai capres alternatif pada Pilpres 2014 melalui jalur konvensi Partai Demokrat. Komunikasi politik ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 2009, Hlm. 35).

Media yang dimiliki oleh pengusaha yang merangkap politisi sulit untuk independen dan bebas dari intervensi. Karena kepentingan ekonomi media massa yang sudah berkembang, maka pers akan berubah tidak lagi menjadi pers yang idealis karena ada campur tangan pemilik media yang akan menjadi *gatekeeper* utama menentukan informasi dan opini "pilihan" untuk diterima oleh masyarakat luas. Hal ini akan membuat informasi yang sampai ke masyarakat telah diatur sedemikian rupa tanpa disadari dan menjadi tidak seimbang. Opini publik yang dibangun dalam pemberitaan kemudian dikontrol, dan akan berhubungannya dengan bisnis-bisnis para pengusaha, atau diarahkan demi kepentingan partai politik yang diharapkan dapat mengontrol sang pengusaha menuju kursi kekuasaan. Hal ini akan berdampak pada hilangnya esensi dan akal sehat media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terutama yang menyangkut permasalahan korupsi.

3) Perkembangan Wacana Korupsi Ditengah Konglomerasi Media

Teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post diproduksi ketika terjadi perubahan besar dalam perkembangan sistem pers di Indonesia, yakni pers di Indonesia mengarah pada bentuk konglomerasi media atau pemusatan kepemilikan perusahaan media.

Media telah menjadi sebuah mekanisme di mana para pebisnis menyampaikan kepentingan mereka dan pada saat yang sama juga mengambil profit dari bisnisnya. Begitu juga yang terjadi dengan Malang Post sebagai pihak yang memproduksi teks berita kasus Hambalang tahun 2013 merupakan bagian dari konglomerasi media, yakni konglomerasi yang dilakukan oleh JPNN dibawah kepemilikan Dahlan Iskan. Representasi kasus Hambalang dalam wacana Malang Post juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh konglomerasi media, melalui konglomerasi ini Malang Post kemudian menjadi alat kontrol kekuasaan yang ditempatkan didaerah guna menciptakan opini-opini publik tertentu yang menyokong peran Dahlan Iskan dalam dunia politik dan bisnis.

Berita-berita korupsi pada akhirnya hanya bertujuan untuk menjangkit pembaca seluas mungkin dan membangun opini tertentu. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada surat kabar Malang Post dalam memberitakan kasus Hambalang tahun 2013 sebagai kasus korupsi yang beredar secara nasional.

“Meskipun kita ini posisinya sebagai koran yang terbit dari daerah, kita ingin mengakomodir kebutuhan pembaca dan untuk memperluas pasar soalnya begini kebutuhan pembaca di Malang itu sebenarnya tidak hanya ingin tau seputar peristiwa yang ada di Malang tetapi juga peristiwa apa yang lagi ramai hari ini yang beredar secara lokal Malang maupun nasional yaa salah satunya kasus Hambalang itu, peristiwanya memang tidak di sini tetapi yang ingin tau beritanya kan seluruh masyarakat Indonesia.”

Penerbitan berita kasus Hambalang seakan hanya menjadi strategi untuk menaikkan oplah dan memperluas jaringan pembaca dari surat kabar Malang Post sehingga fungsi dalam menjalankan kontrol sosial menjadi terabaikan, sebagaimana pers bertanggung jawabnya dalam rangka menyadarkan masyarakat terutama dalam

hal penegakkan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Pers berani menulis berita-berita korupsi sebagai strategi bisnis yang seolah-olah kritis terhadap pemerintah tetapi kekritisannya ini kadangkala diikuti dengan upaya mendramatisasi sebuah peristiwa, tujuan agar berita tersebut tampil menarik dan layak jual sehingga esensi dari berita tersebut menjadi tidak jelas.

Berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post memang menggambarkan berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan para pelaku korupsi dan disertai dengan proses-proses pengusutan kasus tersebut, disisi lain berita tersebut cenderung menyempitkan dalam dimensi aktor daripada sistem. Ada tidaknya keterlibatan tokoh besar dengan nama besar atau memiliki posisi tinggi menjadi faktor penentu utama apakah suatu kasus akan diliput besar-besaran atau cukup diberi porsi kecil. Hal ini dapat dilihat selama tahun 2013, berita tentang kasus Hambalang lebih banyak menitikberatkan pada sosok Anas Urbaningrum sebagai pelaku korupsi.

Berita-berita korupsi pada surat kabar Malang Post terkesan sebatas informasi sehingga hanya menjadi euforia, yang menandakan bahwa kasus korupsi sekedar diberitakan oleh Malang Post tanpa didorong dalam proses pengusutan lebih lanjut. Pers di Indonesia dalam meliput kasus korupsi lebih dipusatkan pada dimensi skandal, dan mengenyampingkan aspek sistem. Pers kemudian cenderung menyensor alur utuh proses penanganan kasus korupsi yang semestinya dimulai dari terbongkarnya korupsi, penyelidikan, pengadilan, dan ditutup dengan langkah-langkah memperbaiki sistem untuk mencegah praktik serupa terulang dikemudian hari. Kasus korupsi yang telah terbongkar akan pelan-pelan terlupakan, dan hilang dari wacana publik karena tertelan oleh gegap-gempita berita media tentang skandal lainnya yang lebih baru, dan kemudian berakhir tanpa adanya tindakan kongkret yang mendasar untuk mereparasi sistem (Darmasaputra dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Ed.), 2009, hlm. 722-723).

KESIMPULAN

Representasi Malang Post terhadap kasus Hambalang menciptakan wacana korupsi dalam perspektif pers lokal yang terbit di daerah dan berusaha memperebutkan kontrol publik terhadap perkembangan wacana korupsi di Indonesia. Dari analisis wacana kritis Norman Fairclough dapat dilihat terdapat dua wacana besar yang direpresentasikan Malang Post dalam teks berita kasus Hambalang yaitu wacana hukum dan korupsi dengan wacana politik dan kekuasaan.

Wacana Malang Post yang direpresentasikan dalam teks berita kasus Hambalang tahun 2013 menampilkan sejumlah realitas yang tersembunyi dibalik teks melalui bahasa berupa kepentingan ideologis dengan cara melakukan kontrol dan pembatasan terhadap isi, relasi, dan subjek untuk melegitimasi keberpihakan yang digambarkan dalam teks. Bahasa dalam teks dimanfaatkan untuk memarjinalisasi dan mengeksklusi setiap pengetahuan yang berusaha menawarkan gagasan penegakkan hukum dalam proses pengusutan kasus Hambalang yang menempatkan KPK sebagai representasi penegakkan hukum di Indonesia. Pengetahuan tersebut menunjukkan proyeksi ideologis yang memuat kepentingan dalam mengontrol masyarakat melalui persepsi-persepsi publik atau melalui hegemoni makna dengan memberi ruang bagi terbangunnya proses pengunggulan pelaku-pelaku korupsi seperti membiaskan peran Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum terkait posisi dan statusnya dalam kasus Hambalang.

Wacana Malang Post dalam representasi kasus Hambalang tidak diproduksi secara alami dalam ruang redaksi melainkan lewat struktur dan aturan-aturan yang dibuat melalui relasi media

sebagai bentuk praktik sosial dengan menafsirkan teks-teks berita kasus Hambalang dari JPNN (Jawa Pos National Network). Faktor utama yang menjadi pertimbangan Malang Post dalam memberitakan kasus Hambalang adalah memperluas jaringan pembaca. Hal ini kemudian terlihat bahwa Malang Post secara ideologi cenderung kapitalisme liberal, yang menekankan kekuatan pasar dianggap paling berperan dalam produksi masyarakat yang dijalankan melalui kebebasan berorientasi. Ideologi Malang Post ini bersifat implisit, artinya tidak dirumuskan secara jelas dalam struktur organisasi pers.

Wacana yang direpresentasikan dalam teks tidak lepas dari hubungan antara aspek sosial, ekonomi, politik, dan struktur sosial. Dalam konteks sosial, wacana tersebut dapat dilihat melalui bahasa yang dikonstruksi atau direkonstruksi pada kondisi dan *setting* sosial tertentu. Representasi kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post dipengaruhi oleh situasi sosial dan institusi sosial terutama dihadapkan pada masa transisi politik menjelang pemilu 2014 dimana isu-isu politik atau geliat politik mulai nampak pada tahun 2013 ketika teks berita kasus Hambalang diproduksi sehingga berita tersebut beriringan dengan isu-isu politik yang terjadi. Dalam institusi sosial, Malang Post sangat berorientasi pada sosok Dahlan Iskan dan JPNN terutama dengan gagasan dan orientasi politiknya yang membawa Malang Post sebagai sarana melakukan komunikasi politik sehingga Malang Post menjadi “pers partisan”. Dampaknya, wacana yang membentuk teks berita kasus Hambalang akan sejalan dengan orientasi Dahlan Iskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana : Pengantar Analisa Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fairclough, Norman. 1992(a). *Discourse and Social Change*. Polity Press Cambridge.

- _____. 2003(b). *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi (Terj.)* Indah Rohmani - Komunitas Ambarawa, Gresik-Malang: Boyan Publishing.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. 2007. *Jurnalistik (Teori & Praktik)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Littlejohn, Stephen. 2002. *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Macdonell, Diane. 2005. *Teori-Teori Diskursus: Kematian Strukturalisme & Kelahiran Poststrukturalisme dari Althusser Hingga Foucault (Terj.)* Eko Wijayanto. Bandung: Teraju Mizan.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Hermeneutika Gadamerian (Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur)*. Malang: UIN –Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Santana, K. Septiawan. 2004. *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wazis, Kun. 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Jember: AM Publishing.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Ed.). 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Internet

- Anonim. 2013. *Biografi*. Diakses dari <http://www.dahlaniskan.net/biografi/>. Pada 13 April 2014 Pukul 21.55 WIB.
- Hidayat, Taufik. 2014. *Ceruk Korupsi Makin Menganga?*. Rilis Media Monitoring oleh Indonesia Indicator. Melalui <http://indonesiaindicator.org/2014/01/28/2409/>. Pada 28 Januari 2014.
- Poltracking. 2014. *Menangkap Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013*. Rilis Hasil Survei Nasional Media Habit dan Elektabilitas Partai Politik dan Riset Media Monitoring oleh Poltracking Institute. Dipublikasikan melalui <http://www.poltracking.com/produk/riset-dan-survei/258/menangkap-geliat-pemberitaan-partai-politik-sepanjang-2013>. pada 14 Januari 2014.
- Setia, Lina. 2012. *Setahun upaya KPK bongkar korupsi proyek Hambalang*. Diakses dari : <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/26/87/700977/setahun-upaya-kpk-bongkar-korupsi-proyek-hambalang>. Pada 17 Maret 2013 Pukul 19.30 WIB.



Alda Laseta Ayatullah, lahir di Jember, Jawa Timur, 30 November 1990. Menyelesaikan Program S-1 di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang tahun 2014. Ketika mahasiswa sempat menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASIGI) tepatnya sebagai koordinator Departemen PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) periode 2011-2012. Pada periode sebelumnya juga sempat menjadi staf pada departemen yang sama.